STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF
BALAI BAHASA PROVINSI BALI 2022

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Dasar Hukum Pelaksanaan UKBI 1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Permendikbud Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia 8. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Permendikbud Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

		7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia 8. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 9. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36 10. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 12. Permendikbud Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia 16. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36 18. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 20. Permendikbud Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia 24. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 25. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 36

		26. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 28. Permendikbud Nomor 63 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 31. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia 32. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Persyaratan	1. Mengakses laman *ukbi.kemdikbud.go.id* untuk melakukan pendaftaran secara personal atau mengajukan surat permohonan kepada koordinator KKLP UKBI untuk pendaftaran secara kolektif; 2. Mengunggah file pasfoto warna terbaru, maksimal 500kb 3. Mengunggah file hasil pindai (.pdf) identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah); 4. Melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran; Pendaftaran dapat dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan;
3.	Prosedur	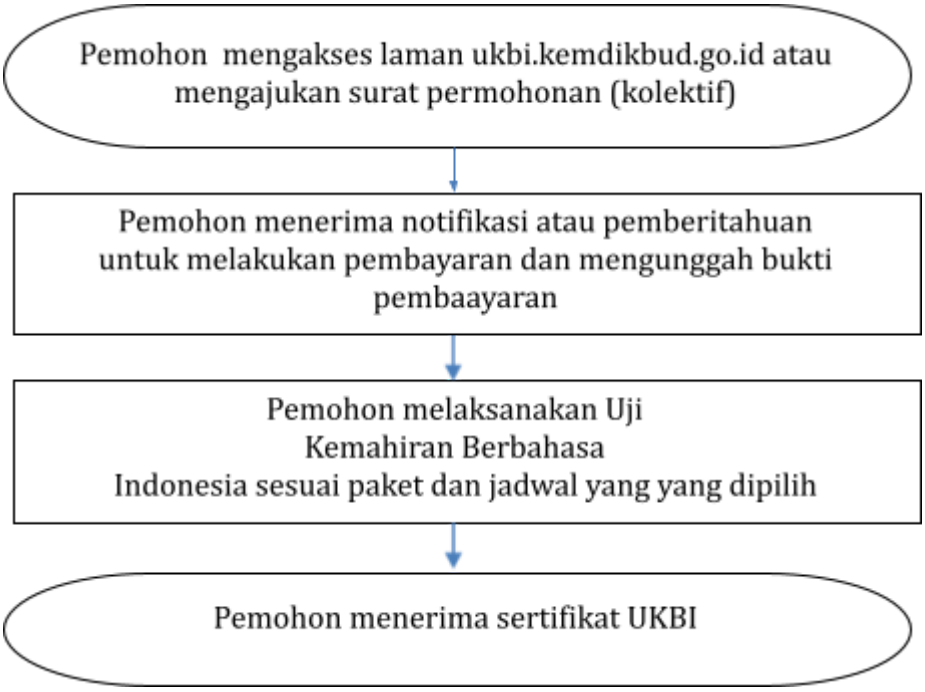
3.	Jangka waktu	Paling lama 14 hari kerja

	penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Sesuai PNBP (PP 82 Tahun 2016) 1. Mahasiswa Rp 135.000,00 (per orang per ujian) 2. Masyarakat Umum Rp 300.000,00 (per orang per ujian) 3. Warga Negara Asing Rp 1.000.000,00 (per orang per ujian)
5.	Produk layanan	Sertifikat UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Bali Jalan Trengguli I Nomor 34, Denpasar Telepon: (0361) 461714 Pos-el : balaibahasa.bali@kemdikbud.go.id Laman : http://balaibahasaprovinsibali.kemdikbud.go.id/ WA : 08113882041 atau Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el:layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telp : 021-4896558 pesawat 2212